

Prabowo Tegaskan Menteri Harus Setia ke Rakyat, Bukan kepada Dirinya

Category: NASIONAL

written by vintech | December 22, 2025



SEANTERONEWS.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepada seluruh jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih bahwa loyalitas utama mereka harus tertuju pada **kepentingan rakyat dan negara**, bukan kepada dirinya sebagai individu kepala pemerintahan. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah acara resmi yang juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi pemerintah.

Prabowo menekankan bahwa jabatan sebagai menteri merupakan amanah yang harus dijalankan demi kesejahteraan masyarakat luas. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan bersifat sementara, sedangkan nilai kebangsaan, konstitusi, serta kedaulatan rakyat harus dijaga dan dijadikan landasan dalam setiap kebijakan yang dibuat.

Menurutnya, pemerintahan yang berjalan dengan baik adalah pemerintahan yang **mengutamakan kepentingan rakyat**, bukan sekadar menjaga hubungan personal atau loyalitas kepada penguasa pemerintah saat ini. Penekanan ini dimaksudkan agar setiap kebijakan dan program kerja kabinet benar-benar berpihak pada kebutuhan rakyat.

Respons terhadap pernyataan Presiden ini datang dari kalangan legislatif. Seorang anggota DPR RI menyebut pesan tersebut sebagai peringatan penting agar para pembantu presiden tidak kehilangan arah dalam menjalankan tugas kenegaraan. Ia menegaskan bahwa kesetiaan kepada bangsa berarti kesetiaan terhadap konstitusi dan aturan hukum yang berlaku – termasuk menghormati putusan lembaga peradilan.

Kritik dan pesan semacam ini muncul di tengah tuntutan publik yang tinggi akan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang benar-benar berpihak kepada masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa loyalitas pejabat publik sejatinya harus tercermin melalui kebijakan yang memberi dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat kecil.

Pernyataan Presiden sekaligus menggarisbawahi pentingnya etika kekuasaan dan kesetiaan konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut pengamat politik, jika pejabat tidak menempatkan rakyat di pusat kebijakan mereka, hal itu bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara.

Pesan tegas tersebut juga dipandang sebagai pengingat bahwa tidak ada jabatan yang lebih tinggi dari kepentingan rakyat. Seorang pemimpin datang dan pergi, tetapi tanggung jawab terhadap konstitusi dan kesejahteraan masyarakat harus terus dijunjung tinggi oleh setiap pejabat negara.

Komitmen pemerintah untuk **mendengarkan suara rakyat** melalui praktik pemerintahan yang bersih, adil, dan transparan menjadi salah satu fokus utama dalam pernyataan tersebut. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap kerja

kabinet serta memastikan kebijakan yang diambil berdampak nyata bagi kehidupan masyarakat.[]